

**POLA REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2024**

ANGGITA KUSUMA WARDANI

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebesar 30%, setiap partai politik perlu menerapkan pola tertentu untuk merealisasikannya. Dalam hal ini DPD PKS Kabupaten Tangerang menjadi menarik untuk diteliti karena keterwakilan perempuan PKS pada Pemilu 2024 justru melebihi kuota 30% tetapi selama 3 kali pemilu, caleg perempuan yang diusungkan tidak ada yang terpilih menjadi anggota DPRD. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Tangerang untuk Pemilu 2024 termasuk memahami kriteria yang ditetapkan oleh PKS dalam memilih calon perempuan yang berkualitas. Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori *supply-demand* yang dikemukakan oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski yang mengidentifikasi empat aspek sumber daya penawaran yaitu keuangan, waktu, pengalaman organisasi, dan jaringan pendukung serta motivasi sebagai pisau analisisnya. Data yang didapat berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang menggunakan pola rekrutmen tertutup yang mengharuskan caleg perempuan untuk berasal dari anggota internal kader dan mengikuti tahapan-tahapan pengkaderan sesuai tingkatan di internal terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga masih mengalami diskriminasi dalam kebijakan internal partai politik, seperti sistem blok kampanye, penomoran urut dan insentif kampanye dari partai.

Kata kunci: Rekrutmen Politik, Calon Anggota Legislatif Perempuan, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu Legislatif 2024.

PATTERNS OF POLITICAL RECRUITMENT OF FEMALE LEGISLATIVE CANDIDATES FOR THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) OF TANGERANG DISTRICT IN 2024

ANGGITA KUSUMA WARDANI

ABSTRACT

Based on Law Number 2 Year 2011 Article 29 which regulates the representation of women by 30%, each political party needs to apply a certain pattern to realize it. In this case, DPD PKS Tangerang Regency is interesting to study because PKS women's representation in the 2024 Election actually exceeds the 30% quota, but for 3 elections, none of the female candidates nominated were elected as DPRD members. Therefore, this study aims to determine the recruitment pattern applied by the Prosperous Justice Party (PKS) in recruiting female legislative candidates in Tangerang Regency for the 2024 Election, including understanding the criteria set by PKS in selecting qualified female candidates. The research that the researcher conducted used the supply-demand theory proposed by Pippa Norris and Joni Lovenduski which identified four aspects of supply resources, namely finance, time, organizational experience, and support networks and motivation as an analytical knife. The data obtained came from interviews and literature studies. The results of this study show that the Prosperous Justice Party of Tangerang Regency uses a closed recruitment pattern that requires female candidates to come from internal cadre members and follow cadre stages according to internal levels first. In addition, they also still experience discrimination in internal political party policies, such as the campaign block system, serial numbering and campaign incentives from the party.

Keyword: *Political Recruitment, Women Legislative Candidates and The Prosperous Justice Party (PKS), 2024 Legislative Elections.*